

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DI DESA HARIANJA KECAMATAN  
PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TIGOR ALBERT JOSUA SINURAT**

**198520047**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DI DESA HARIANJA KECAMATAN  
PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Politik  
Universitas Medan Area*

**OLEH:**

**TIGOR ALBERT JOSUA SINURAT**

**198520047**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NAMA** : TIGOR ALBERT JOSUA SINURAT  
**NPM** : 198520047  
**JUDUL** : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HARIANJA KECAMATAN PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Disetujui oleh,

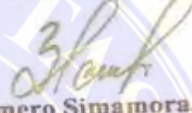
**Pembimbing I**



**Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP**

Tanggal \_\_\_\_\_

**Pembimbing II**



**Beltah mamero Simamora, SIP .M.PA**

Tanggal \_\_\_\_\_

**Mengetahui**



**Dekan**

**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si,**

Tanggal \_\_\_\_\_



**Ka Prodi Administrasi Publik**

**Kharunnisah Lubis S.Sos, M.I.Pol**

Tanggal \_\_\_\_\_

**Tanggal Lulus** :

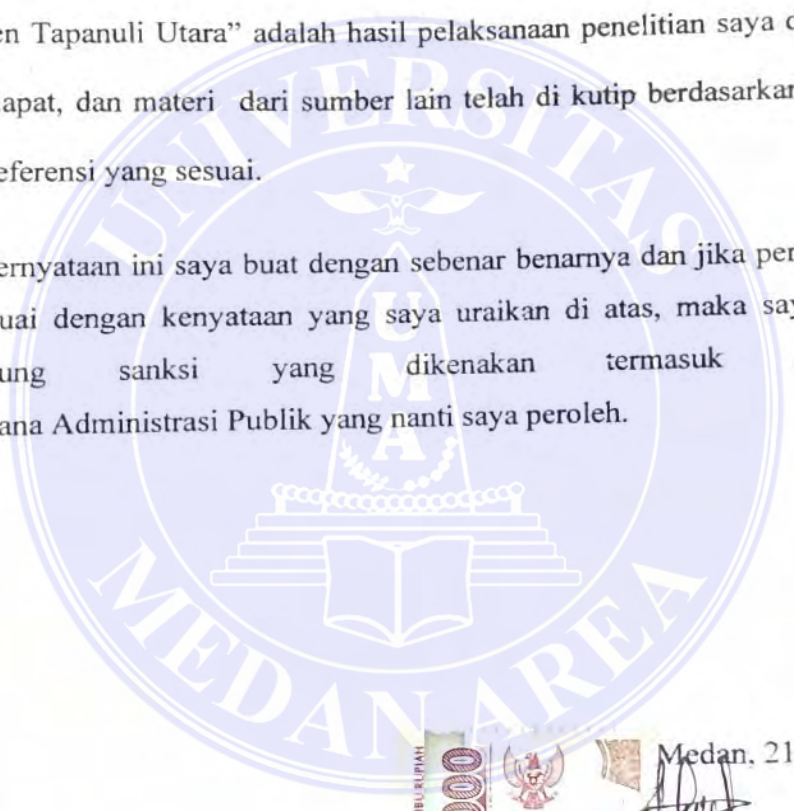
## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Tigor Albert Josua Sinurat  
Npm : 198520047  
Tempat/Tanggal Lahir : Harianja, 01 November 2001  
Alamat : Jln sering Gg Umar, Medan Tembung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara” adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah di kutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya uraikan di atas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang dikenakan termasuk pencabutan gelar sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.



Medan, 21 Mei 2023  
  
Tigor A J Sinurat  
198520047





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPS/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai Civitas Akademi Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tigor Albert Josua Sinurat  
Npm : 198520047  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demı pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive-Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara" beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Fsklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (databes), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 21 mei 2023  
  
Tigor A J Sinurat  
19842004

  
METERAI  
TEMPEL  
92620AKX636066997

## ABSTRAK

PKH merupakan program bantuan sosial besyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peneliti mengambil lokasi di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan terdapat beberapa penerima Manfaat PKH yang bukan dikategorikan miskin. Tujuan dari penelitian Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan implementasi kebijakan George C Edward III. Teori tersebut melihat variabel mudah menstrukturkan proses implementasi secara tepat dan variabel diluar kebijakan yang mendiskripsikan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

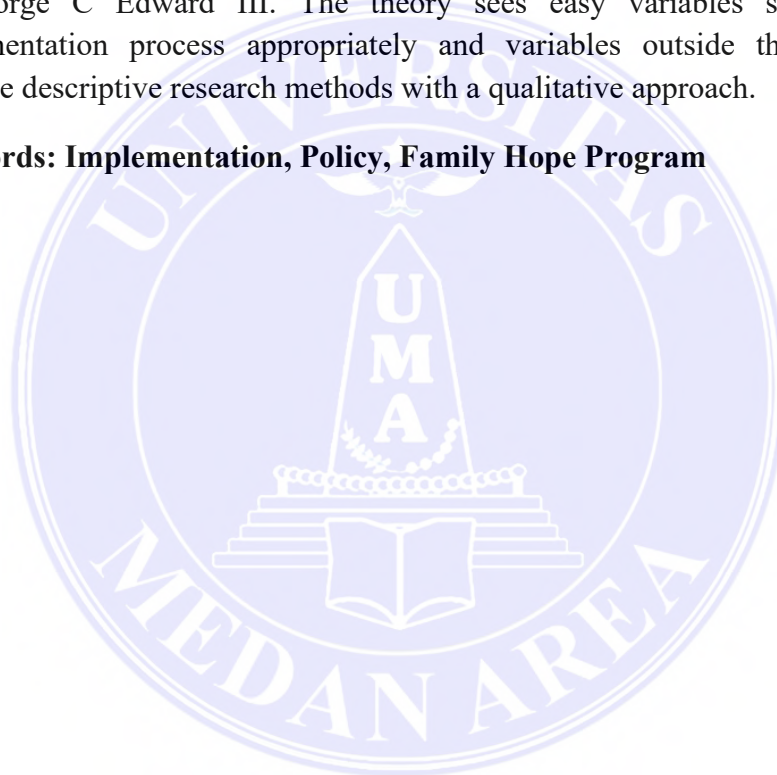
**Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH)**



## ABSTRACT

PKH is a conditional social assistance program for Beneficiary Families (KPM). The researcher took the location in Harianja Village, Pangaribuan District, North Tapanuli Regency because there were several PKH beneficiaries who were not categorized as poor. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Family Hope Program (PKH) is implemented in Harianja Village, Pangaribuan District, North Tapanuli Regency. To find out the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Family Hope Program in Harianja Village, Pangaribuan District, North Tapanuli Regency, the theoretical approach used in this research is the policy implementation approach of George C Edward III. The theory sees easy variables structuring the implementation process appropriately and variables outside the policy that describe descriptive research methods with a qualitative approach.

**Keywords: Implementation, Policy, Family Hope Program**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Tigor Albert Josua Sinurat  
Tempat, Tanggal Lahir : Harianja , 01 November 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln Sering Gg Umar, MedanTembung  
Status : Belum Menikah

### Latar Belakang Pendidikan

2007-2013 : SD 1731920047 Harianja  
2013-2016 : SMP Negeri 1 Pangaribuan  
2016- 2019 : SMA Swasta HKBP 1Tarutung  
2019- 2023 : S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapann (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Daadang Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tapanuli Utara.
3. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunissah Lubis, S.Sos, M.I.POL, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

5. Ibu Dr Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, Arahan, Nasihat serta meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi dengan baik.
6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan serta Waktu dan arahan yang bersifat membangun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Chairika Nasution S.AP.MAP Selaku sekretaris skripsi telah membantu penulis serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan Informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
9. Para Pihak Pegawai dan masyarakat Desa Harianja yang telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
10. Koordinator serta Pendamping PKH atas kesediannya untuk membantu penulis selama masa penelitian serta staf kecamatan Pangaribuan yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti untuk mengurus surat-surat penelitian

11. Kepada Kedua Orangtua yang saya cintai yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan serta senantiasa memberikan semangat yang tak ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam menjalani hari demi hari.

12. Kepada Saudaraku Kristina Sinurat, Ronasib Sinurat, Augus Sinurat yang senantiasa mensupport, berdoa dan bantuan yang tak ternilai harganya pada penulis.

13. Kepada Teman-teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Angkatan 2019.

Semoga Kebaikan dan Pertolongan semuanya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun kritik ini lebih baik maka akan penulis terima. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Januari 2023

Hormat Saya

**Tigor A J Sinurat**

1985200047

## DAFTAR ISI

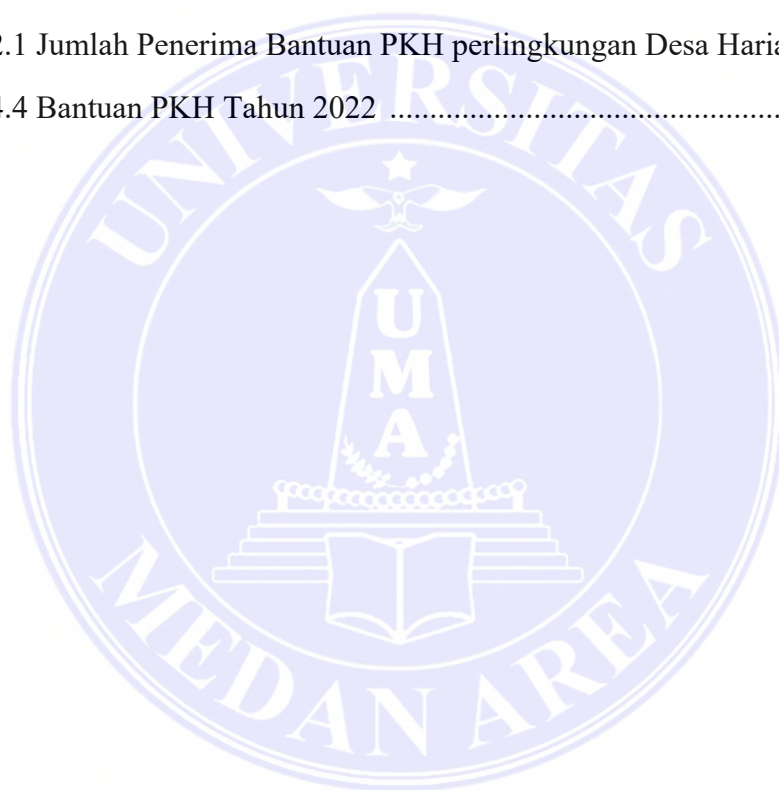
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kebijakan Publik.....	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.2 Kemiskinan .....	16
2.2.1 Pengertian Kemiskinan .....	16
2.3 Kemiskinan Desa .....	17
2.3.1 Karakteristik Desa Miskin .....	17
2.3.2 Penyebab Kemiskinan Pedesaan.....	18
2.4 Program Keluarga Harapan (PKH).....	19
2.4.1 Defenisi Program Keluarga Harapan (PKH).....	19
2.4.2 Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).....	19
2.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	20
2.4.4 Aturan Kebijakan Dan Dasar Hukum penyelenggara PKH.....	21
2.5 Kerangka Berfikir .....	25
2.6 Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	30

3.2.2 Waktu Penelitian .....	31
3.3 Sumber Data .....	31
3.4 Informan Penelitian.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 HASIL PENELITIAN .....	36
4.1.1 Gambar Umum Desa Harianja.....	36
4.1.2 Pemerintahan.....	38
4.1.3 Kependudukan .....	39
4.1.4 Pendidikan.....	40
4.1.5 Kesehatan .....	40
4.2 Deskripsi Unit Pelaksana Program keluarga Harapan (PPKH) Desa Harianja... 41	
4.2.1 Kedudukan dan Wewenang PPKH Desa Harianja.....	41
4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping PKH .....	42
4.2.3. Lingkungan Penerima PKH Desa Harianja.....	43
4.2.4 Deskripsi Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Harianja .....	44
4.3 Pembahasan.....	45
4.3.1 Faktor Penghambat Implementasi PKH di DesaHarianja.....	66
4.3.2 Deskripsi Analisis Implementasi Program PKH di Desa Harianja.....	70
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
LAMPIRAN .....	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021 di Tapanuli Utara .....	1
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021 di Desa Harianja .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	32
Tabel 3.2 Nama-nama Informan .....	34
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Harianja.....	38
Tabel 4.2 Daftar Nama Kepala Lingkungan Desa Harianja .....	39
Tabel 2.1 Jumlah Penerima Bantuan PKH perlingkungan Desa Harianja .....	45
Tabel 4.4 Bantuan PKH Tahun 2022 .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4.1 Peta Desa Harianja .....	37



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Manajemen PPKH Desa Harianja .....	44
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	76
Dokumentasi Penelitian .....	79
Surat Keterangan dari Fakultas .....	82
Surat Keterangan selesai Riset .....	83



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang dirasakan oleh kabupaten Tapanuli Utara, kemiskinan merupakan suatu kondisi bukannya hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, selain itu juga disebabkan karena banyaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akan akses terhadap pelayanan dasar seperti keterbatasan akses modal, sarana produksi, indikasi dari kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan seperti, gizi buruk, taraf hidup masyarakat yang buruk, banyaknya pengangguran dan lain-lain dan Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, terlebih bagi kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan data badan pusat statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 sebanyak 33.800,00 jiwa, pada Tahun 2020 sebanyak 32.230,00 jiwa dan pada Tahun 2021 sebanyak 33.370,00 jiwa sedangkan di Desa Harianja jumlah penduduk miskin Tahun 2019 sebanyak 72 jiwa pada Tahun 2020 sebanyak 80 jiwa dan pada Tahun 2021 sebanyak 75 jiwa.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2019 –2021 di Tapanuli Utara**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
1	2019	33 800,00
2	2020	32 230,00
3	2021	33 370,00

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Tapanulin Utara, 2021*



**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin 2019 – 2021 di Desa Harianja**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
1	2019	72
2	2020	80
3	2021	75

*Sumber : sadar Harianja perangkat Desa Harianja*

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan kabupaten Tapanuli Utara. Khususnya masalah fakir miskin, maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada pada Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan kabupaten Tapanuli Utara, salah satu program kusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah program Keluarga Harapan (PKH), program ini dilakukan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang sosial.sebagai salah satu program yang di dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2007.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu program Perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat prasejahtera atau masyarakat kalangan kelas Konomi bawah. Program ini di realisasikan dengan memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Berdasarkan data yang penulis peroleh menyebutkan bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 sebanyak 2.224 orang, sedangkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Tahun 2021 sebanyak 36 orang.

Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan, selain memberi kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan merubah Perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Program ini memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dengan catatan mengikuti persyaratan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan Mampu mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas Kesehatan

Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan Kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi Kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan kematian bayi. Rendahnya kondisi Kesehatan keluarga sangat miskin berdampak tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun.

Berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara khususnya bidang Pendidikan dan Kesehatan, terutama bagi RTSM perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya

pemerintah membangun sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan serta meluncurkan Program-program yang di tunjukkan bagi keluarga miskin. Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar Pendidikan dan Kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada RTSM maupun sisi pelayanan pada sisi RTSM. Alasan terbesar untuk melanjutkan sekolah ialah karena tidak ada biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa Pendidikan sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya dengan Kesehatan, RTSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan Kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan.

Dari sisi kebijakan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) yang mewajibkan RTSM menyekolahkan dan memeriksakan Kesehatan anak anaknya, serta memeriksakan ibu hamil, akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya Kesehatan dan Pendidikan bagi anak anaknya, perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada kurangnya anak usia sekolah RTSM yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi keluarga miskin, dimana pun mereka berada.

Salah satu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah, Menurut data BPS masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada pada usia sekolah tidak berada

dalam sistem persekolahaan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah Program Keluarga Harapan (PKH) harus dapat menjaring mereka yang berada di luar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi pekerja anak. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), terutama untuk daerah yang diduga banyak terdapat pekerja anaknya akan dibekali dengan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke bangku sekolah. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders)

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan, tetapi selama ini dari pihak pembuat kebijakan tidak mengharuskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar menggunakan uang, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk akses pendidikan maupun kesehatan. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal

pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berarti apakah bantuan yang diterima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) digunakan untuk hal yang menunjang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan pra penelitian tidak sesuai dengan wacana yang dikemukakan oleh pemerintah setempat, baik dari proses pendataan yang berhak menerima Program Keluarga Harapan maupun pada saat penyaluran. Salah satu permasalahan pada saat penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dari 60 orang Rumah Tangga Sangat Miskin yang telah terdata sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hanya sekitar 36 orang yang mendapat bantuan. Kemudian masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai RSTM tidak terdata atau tidak masuk pada peserta PKH. Hal ini sangat miris ditambah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa Harianja, juga adanya oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan bantuan Program Keluarga Harapan yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapnuli Utara.



## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara?
- 2) Apa faktor penghambat Implementasi kebijakan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Menambahkan wawasan penulis dalam mewujudkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti objek yang sama di lokasi yang berbeda

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi pendamping Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan, sebagai masukan bagi pemerintah

untuk melihat bagaimana jalannya Program Keluarga Harapan (PKH) dari respon peserta PKH sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja dalam pengimplementasikan PKH agar manfaat dari PKH benar benar dapat dirasakan rumah tangga sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macammacam dari kebijakan yaitu :

a. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara.

### 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Riple dan Franklin (Budi Winarno, 2014:148 ) implementasi adalah apa yang terjadi setelah

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor penyebab yang mempengaruhi suatu program. Ripley dan Franklin menjelaskan ada 5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini, yaitu : banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kompleksitas program pemerintahan, partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014, p. 232) Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan yang dimaksud merupakan usaha untuk mengubah sebuah keputusan menjadi tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu baik itu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha dalam pencapaian perubahan besar ataupun perubahan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap Implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Upaya mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu diimplementasikan. Tanpa implementasi maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2017) bahwa pelaksanaan



kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan, Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sejalan dengan pendapat Udoji, Menurut George C Edward III (Winarno,2008), berpendapat bahwa implementasi sangat penting bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi adalah tahap kebijakan antara pembentukan rencana dan konsekuensi kebijakan dari mereka yang mempengaruhinya. Jika sebuah rencana tidak dapat mengurangi masalah sebagai tujuan kebijakan, maka rencana tersebut mungkin gagal meskipun dilaksanakan dengan baik, dan rencana yang baik mungkin gagal bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016:126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan dalam mengambil keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dan dalam konteks upaya terus menerus agar mencapai perubahan besar yang dimana harus di tentukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan atau di tentukan

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami bahwa apa yang sebenarnya terjadi setelah rencana di nyatakan efektif atau yang di rumuskan adalah fokus

implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah di setujuinya pedoman kebijakan nasional, termasuk upaya pengelolaannya dan realisasinya. Kepada pemerintah, masyarakat ataupun dampak dari peristiwa tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran sasaran kebijakan itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut George C Edward III sebagai berikut

#### 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suratman dalam (Mahmud, 2019) menjelaskan

bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dana tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda (Suratman 2017)

## 2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan, tanpa sumber daya yang memadai tentu implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang kurang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan program tersebut. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan yang dimiliki terbatas maka harus meningkatkan skill atau kemampuan para staf. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik. Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam mengimplementasi kebijakan sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial

## 3. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan napa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik

#### 4. Disposisi

Disposisi ialah kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasilkan

implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan pelaksana dan insentif.

## 2.2 Kemiskinan

Berikut adalah tinjauan teori mengenai kemiskinan berupa definisi, penyebab dan kriteria kemiskinan.

### 2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan secara berbeda oleh beberapa badan/ instansi dan para ahli. Kemiskinan didefinisikan dengan dimensi yang lebih luas, yaitu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia secara fisik (kebutuhan dasar materi dan biologis termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan) serta sosial berupa risiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang.(World Bank,2000). Kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, berupa kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan.(Badan Pusat Statistik,2008)

Kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial yaitu:(John Friedman,1979)

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah, rumah, peralatan dan kesehatan.
2. Sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi.



4. Network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai/
5. Informasi-informasi yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat

Masyarakat dinyatakan miskin ditandai dengan adanya ketidakberdayaan atau kemampuan (powerlessness) dalam hal, yaitu: (Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003)

1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation); 10
2. Melakukan kegiatan yang tidak produktif (unproductiveness);
3. Tidak dapat menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (inaccessibility);
4. Menentukan nasibnya sendiri dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan vatalistik (vurnerability) dan Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat harga diri yang rendah (no freedom for poor)

### **2.3 Kemiskinan Desa**

#### **2.3.1 Karakteristik Desa Miskin**

Desa miskin adalah suatu daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Lokasi desa miskin pada umumnya jauh dari pusat-pusat pelayanan "Kota Kecamatan". Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan, area yang luas, dan kondisi bentang lahan dengan topografi "berat" mengakibatkan transfer informasi, materi dan moneter antara desa dengan pusat pelayanan formal menjadi

sangat terbatas. Pada umumnya transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan masih sangat terbatas.

Permasalahan masyarakat desa untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidupnya adalah keterbatasan akses terhadap barang dan jasa utama seperti kesehatan, pendidikan, air, dan sumber daya alam lainnya, pasar dan kesempatan kerja. (Sukarno, Ari, & Dinanti, 2013)

### **2.3.2 Penyebab Kemiskinan Pedesaan**

Penyebab kemiskinan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketersediaan akses maka manusia menghadapi keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Saat ini dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. (Mahaga, 2009)

terdapat tiga penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan yang muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas.
2. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan pendapatan dan upah yang rendah. rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.

3. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan akses. Terkait dengan penyebab kemiskinan, menurut World Bank setidaknya terdapat tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:
  - a. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
  - b. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.
  - c. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya. Hendra, 2010

## **2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **2.4.1 Defenisi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS (Rumah tangga sasaran) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan program ini, dalam jangka penndek mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar ge erasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

### **2.4.2 Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)**

- a) Merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada Pendidikan dan Kesehatan anaknya

- b) Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin
- c) Untuk jangka Panjang dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui :
  1. Peningkatan kualitas Kesehatan/nutrisi, Pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak di masa depan
  2. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya
- d) Mengurangi pekerja anak.
- e) Mempercepat pencapaian MDGS (melalui peningkatan akses Pendidikan, peningkatan Kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesejahteraan gender)

#### **2.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miiskin. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi peserta PKH
- 2) Meningkatkan tarif Pendidikan peserta PKH
- 3) Meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil, anak prasekola anggota rumah tangga sangat miskin (RSTM)/keluarga sangat miskin (KSM )
- 4) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkann pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi populasi kemiskinan

#### 2.4.4 Aturan Kebijakan Dan Dasar Hukum penyelenggara PKH

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappemnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, BPS, TNP2K, dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKH dijalankann berdasarkan peraturan :

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin 1 lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).



## Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Program Keluarga Harapan sudah diarahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu disabilitas, lansia, ibu dan anak. Perubahan ini mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan atau generasi. Penerima bantuan adalah KPM yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi satu atau kriteria program, yaitu :

1) PKH Bidang Pendidikan

Komponen peserta PKH bidang Pendidikan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Anak SD
- b) Anak SMP
- c) Anak SMA/SMK

2) PKH Bidang Kesehatan

Komponen peserta PKH bidang Kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Ibu hamil
- b) Anak bayi
- c) Anak balita
- d) Anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

### 3) PKH Bidang Kesejahteraan Sosial

Kompnen peserta PKH bidang kesejahteraan sosial adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Penyandang distabilitas berat
- b) lansia usia 70 ke atas

KPM yang terpilih sebagai peserta PKH mendapatkan kartu yang digunakan untuk memperoleh bantuan non-tunai bersyarat. Kartu PKH merupakan bukti kepesertaan. Sesuai pedoman pelaksanaan Jaskemnas pada tahun 2012 kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jaskemnas sementara untuk selirih anggota keluarga penerima bantuan PKH, apabila KPM tidak memiliki kartu Jaskemnas.

Bantua non-tunai bersyarat akan disalurkan kepada peserta PKH setiap 3 (tiga) bulan setiap dalam setahun. Baantuan tahap pertama diberikan jika peserta PKH telah menghadiri pertemuan awal yang di koordinir oleh UPPKH kecamatan dan telah mengunjungi pemeberi pelayan kesehatan. Bantuan tahap berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH adalah telah memenuhi komitmen yang di verifikasi dalam bentuk formulir oleh pemdamping PKH. Pesrta PKH akan mendapatkan bantuan apabila memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah di tetapkan.

Sebagaimana tujuan utama PKH yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan adalah:

a. Peserta diwajibkan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang Kewajiban Bidang Pendidikan

berusia 7-15 tahun yang belum terdaftar di sekolah. Anak yang berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan atau buta aksara harus didaftarkan segera di kesatuan pendidikan formal atau non formal. Pendamping diwajibkan mendampingi peserta PKH yang melakukan pendaftaran anak kepada kesatuan pendidikan dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan selama setahun ajaran berlansung.

b. Kewajiban Bidang Kesehatan

KPM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam aturan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Anak bayi usia 0-11 bulan, imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
2. Anak bayi usia 6-11 bulan, mendapat suplemen vit A
3. Anak balita usia 1-5 tahun, imunisasi tambahan dan pemeriksaan badan, setiap bulan
4. Anak balita usia 5-6 tahun, pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapat vit A sebanyak 2 kali dalam setahun.

c. Kewajiban Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Penyandang disabilitas berat

kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care).

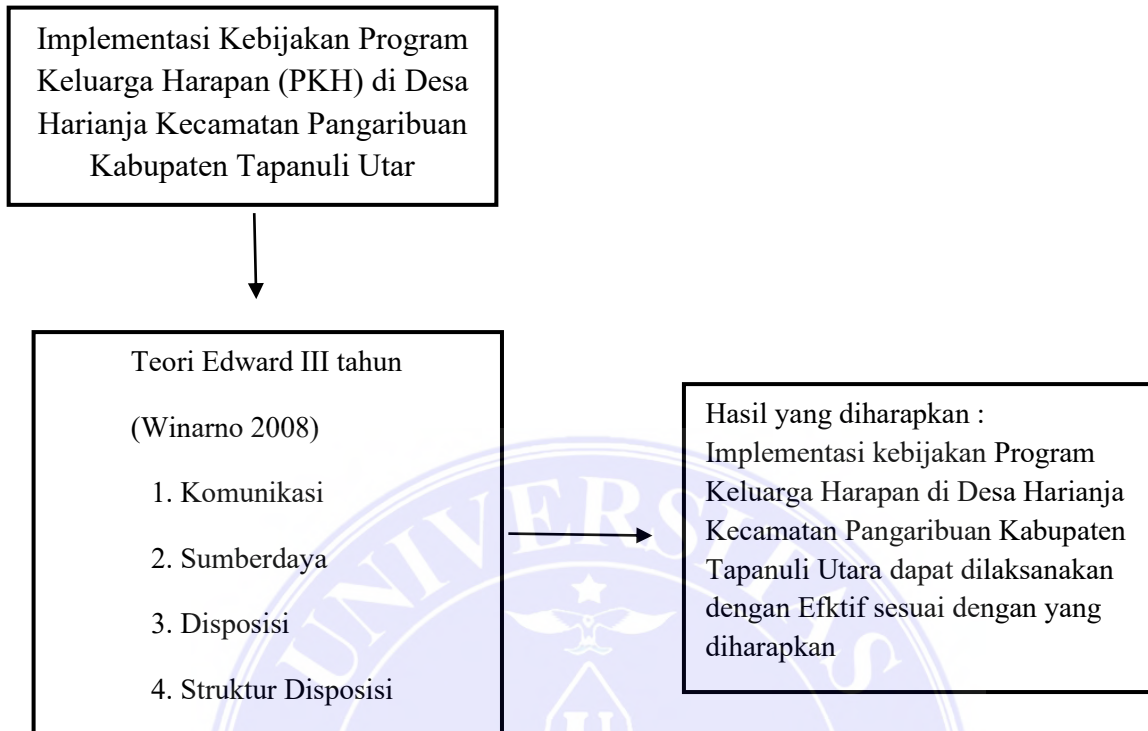
2) Lansia usia 70 tahun ke atas

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Mengikuti kegiatan sosial (day care and home care)

**2.5 Kerangka Berfikir**

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, seperti yang dikemukakan Edward III dalam menjelaskan pendekatan implementasi seperti : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hal ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara sudah efektif dan efisien, atau tidak

**gambar 2.1 kerangka berfikir**



Program Keluarga Harapan yang sering disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, seperti yang dikemukakan Edward III menjelaskan pendekatan implementasi seperti : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hal ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara sudah efektif dan efisien, atau tidak.



## 2. 6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari adanya penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas maupun implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

**tabel 2.1 peneltian terdahulu**

NO	NAMA/JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBERDAAN/PERSAMAAN PENELITIAN
1	Rizki Rigeras  Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal tahun 2019	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan Tegal timur kota Tegal pada kategori efektif dengan total skor 4806 yang didapatkan dari perhitungan rumus rentang skala.	a. Perbedaanya peneliti terdahulu fokus kepada kemiskinan sedangkan peneliti ini fokus dalam pelaksanaan PKH  b. Persamaanya sama sama meneliti tentang kebijakan kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan
2	Prisca Lucya  Implementasi Program Keluarga	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa Implementasi Program	a. Perbedaanya fokus penelitian terdahulu di kecamatan sedangkan peneliti

	Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara		Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara belum sepenuhnya efektif yang dibuktikan beberapa indikator yang di teliti	ini fokus di desa b. Persamaanya Sama sama meneliti Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan
3	Claudio Usman Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan (suatu studi di kecamatan kota utara kota Gorontalo)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat program yang belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan, dan masih belum berjalan s ebagai mana mestinya program ini program in i efektivitas program ke luarga harapan berpengaruh secara signifikan	a. Perbedaanya Fokus penelitian terdahulu pada implementasi penagnggulangan Penelitian ini : fokus pada implementasi Program Keluarga Harapan b. Persamaanya Persamaanya Sama sama meneliti Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Deskriptif kualitatif ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Tujuan peneliti ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Penelitian menggunakan metode kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Kriyantono (2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan sedalam dalamnya. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan

induktif. Proses dan makna (Perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif

Dalam penelitian ini, menganalisis kebijakan yang dilaksanakan untuk mengetahui formulasi kebijakan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian adalah “deskriptif kualitatif” yang merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

## **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara serta untuk mendapatkan bukti dan dokumentasi berupa foto rumah penerima manfaat keluarga harapan ini maka penulis akan berkunjung ke beberapa rumah tangga penerima bantuan PKH ini. Dengan alasan memilih lokasi tersebut adanya ketertarikan akan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara serta ingin mengetahui sejauh mana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara

### 3.2.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1 Waktu penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Otk	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■					
3	Seminar Proposal						■				
4	Perbaikan Proposal						■				
5	Pengambilan Data Penelitian							■			
6	Penyusunan Skripsi							■	■		
7	Seminar Hasil									■	
8	Perbaikan Skripsi									■	
9	Sidang Meja Hijau										■

### 3.3 Sumber Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya ada 2 (dua) sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1. Data primer

Data primer yaitu untuk mencari data yang akurat dalam pengembangan komoditas pada Kawasan strategi kabupaten Tapanuli, Kecamatan Pangaribuan khususnya Desa Harianja

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, yang berupa dokumen dokumen dan berbagai dokumentasi



### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memahami tentang informasi dari obyek penelitian dan teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive penentuan informan secara sengaja, teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang menurut sumber datanya adalah orang yang ahli tentang bidang tersebut. Adapun informan yang dimaksud adalah:

a. Informan kunci

Informasi kunci adalah orang-orang yang mengetahui serta memahami tentang informasi penting dalam hal permasalahan serta objek yang diteliti.

b. Informan utama

Informan utama merupakan orang-orang yang ikut serta dan mengalami secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini ialah merupakan beberapa keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian.

c. Informasi tambahan

Informasi tambahan merupakan orang-orang yang benar-benar memberikan informasi maupun data meskipun mereka tidak ikut serta secara langsung dalam hal yang diteliti.

Tabel 3.2 Nama-nama Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Efendi Harianja	Kepala Desa Harianja	Informan Kunci
2	Horjana Tambunan	Koordinator Kecamatan	Informan Utama
3	Roi Tambunan	Pendamping PKH	Informan Utama
4	Alan Manik	Perangkat Desa	Informan Tambahan
5	Nurmalela Sihotang	Penerima PKH	Informan Tambahan
6	Seneria Pangaribuan	Penerima PKH	Informan Tambahan
7	Loinard Tambunan	Peserta Penerima PKH	Informan Tambahan

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data yang memenuhi standar data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi

#### 2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya, sehingga dapat

diskonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam mennginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari informasi tentang hal hal yang berhubungan dengan permasalahan oleh si peneliti yang terdiri dari catatan catatan penting, transkrip, buku, dan lainnya, dokkumentasi ini menjadi bukti resmi yang harus di pertanggung jawabkan

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (1984) dalam buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus samapi tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2019:321),

Dalam teknik menganalisis data deskriptif kualitatif (Sugiyono,2019: 321) ada beberapa langkah dalam menganalisis data sebagai berikut :

#### 1. *Data Collection (Pengumpulan Data)*

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketinganya.

2. *Data reduction (Reduksi Data)*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti.

3. *Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian dan bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat Naratif

4. *Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan kabupaten Tapanuli Utara belum dapat sepenuhnya di implementasikan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah karena dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program keluarga harapan yaitu, pendamping PKH dan aparat desa yang menjadi pelaksana program keluarga desa
2. Adapun hambatan yang dijumpai pada penelitian ini, meliputi ketidakadilan dalam pemberian bantuan yang dianggap tidak menyaluruh terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin, hal ini disebabkan karena tidak updatenya data kemiskinan di Desa Harianja

#### 5.2 Saran

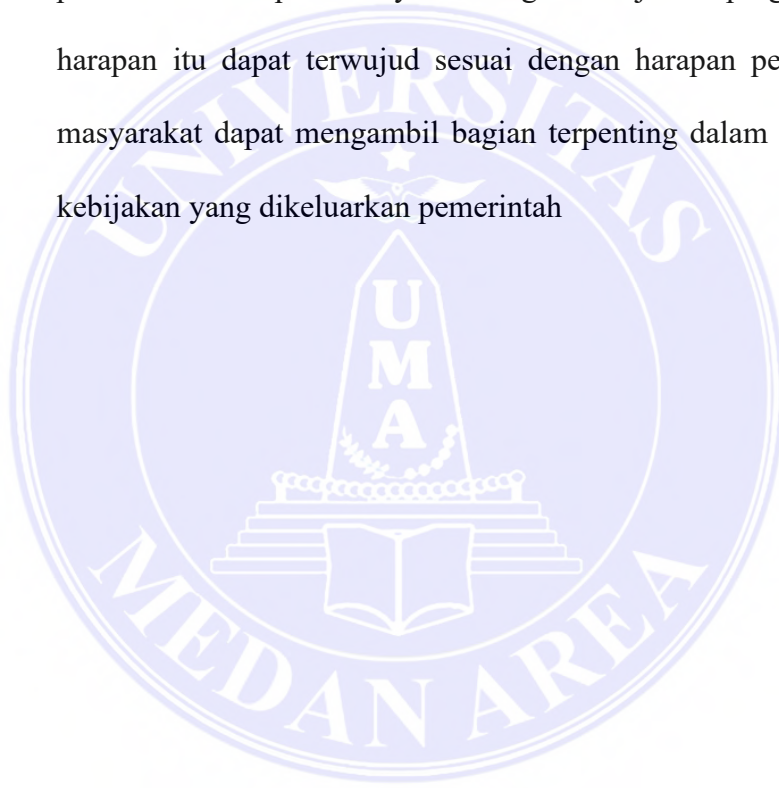
Adapun saran agar kedepannya untuk lebih meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak salah sasaran serta tidak menimbulkan salah paham anra setiap individu, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pelaksana ataupun penanggungng jawab dari program keluarga harapan di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara kiranya lebih dalam memperhatikan



kekurangan dalam pelaksanaannya agar tujuan dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Harianja melalui kebijakannya Program Keluarga Harapan dapat terwujud dan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah.

2. Faktor faktor dalam mensukseskan kebijakan program keluarga harapan kiranya dapat diperhatikan dan diberi perhatian khusus oleh pemerintah maupun masyarakat agar kebijakan program keluarga harapan itu dapat terwujud sesuai dengan harapan pemerintah, dan masyarakat dapat mengambil bagian terpenting dalam mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Buku Panduan Pedoman Program Keluarga Harapan, 2017

Bhinadi, Ardito. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta). Yogyakarta: Deepublish.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yongyakarta

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Badan Pusat Statisti

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society 6. London: Sage. Miles, MB, dan H

Philip, M. Hadjon, Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 2014.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV.Alfabeta

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019

### Sumber Jurnal

Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.

Achmad Kuncoro, Engkos dan Ridwan. (2018). Kemiskinan . Edisi kedua. Bandung : Alfabeta

Esterberg, Kristin G,2002 ; Qualitative Methods Ins Social Research, Mc Graw Hill, New York

Grindle, 2012. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.

Handoyo T. Hani (2002), *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta

Nasution s, (1998) *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif Tarsiti Bandung*

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Pratama, Yoghi, Citra.” Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia”. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1984

Wayan, Ni, Ria, Suadnyani 2018, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangli, *dalam E-Jurnal EP Unud* 10 (2) :106-111

### Sumber Internet

Kementrian Sosial,2016 “Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial”. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 dari <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No11-2009.pdf>.detia News 2023,Implementasi kebijakan Program keluarga Harapan( PKH) diakses pada 17 Januari 2023

Sumber: International Fund for Agricultural Development, 2007 International Institute for Applied Systems Analysis, 1999 World Bank, 2010

## LAMPIRAN

- PEDOMAN WAWANCARA

No	Informan	Jabatan	Pertanyaan
1	Horjana Tambunan	Koordinator PKH Kecamatan	<p>Dari pihak apa saja yang terkait dengan pelaksana program keluarga harapan ?</p> <p>APA tujuan dan sasaran program ini?</p> <p>Dalam suatu program pasti ada hambatan, hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan program ini ?</p> <p>Apakah pelaksana PKH itu dipilih langsung oleh dinas sosial?</p> <p>Apakah peraturan program ini selalu berubah ubah ?</p>
2	Roi Tambunan	Pendamping PKH	<p>Apa saja kendala yang ditemui dilapangan dalam pelaksanaan pogram keluarga harapan ?</p> <p>Apa saja kriteria masyarakat untuk layak mendapatkan program ini ?</p> <p>Bagaiman proses pencairan program ini dan di mana ?</p> <p>Apa tugas dan tanggung jawab saudara dalam pelaksanaan program ini ?</p> <p>Selain pendamping masih adakah peugas yang berwenang menangani ini di lapangan ?</p>

3	Efendi Harianja	Kepala Desa	Kapan program ini dilaksanakan dan apakah sudah ditentukan waktu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ?
			Bagaimana cara pendataan masyarakat terkait program ini ?
4	Nurmalela Sitohang	Penerima PKH	Kapan saudara mengetahui adanya program keluarga harapan ini ?  Setelah pencairan, dana tersebut digunakan untuk keperluan apa saja ?  Apa saja syaratnya untuk mengambil pencairan program ini, dan apakah sudah pernah melanggar aturan tersebut ?
5	Seneria pangaribuan	Penerima PKH	Darimana saudara mengetahui adanya program keluarga harapan ?  Apakah informasinya lancar kepada saudari selaku penerima program PKH ?



- Dokumentasi Penelitian



Foto dengan Kepala Desa Harianja  
( Bapak Efendi Harianja)



Foto Bersama Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping PKH  
(Ibu Horjana Tambunan & Bapak Roi Tambunan)



Foto dengan Penerima PKH ( Ibu Nurmalela Sihotang )



Foto dengan penerima PKH (Ruts Silalahi)




Foto Bersama Perangkat Desa Harianja  
(Bapak Erick Harianja)



Foto Peserta Penerima PKH  
(Ibu Loinard Tambunan)



- Surat Keterangan dari Fakultas

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 574/FIS.2/01.10/IV/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset  
10 April 2023

Yth,  
**Kepala Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara  
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Tigor Albert Josua Sinurat  
N P M : 198520047  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara**, dengan judul Skripsi "*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara*"


Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Elna Juliana Hasibuan, M.Si**

CC : File,-



- Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KECAMATAN PANGARIBUAN  
DESA HARIANJA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :470/61 /12.02.13.2019/Sikripsi-Fak/ V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik “ UNIVERSITAS MEDAN AREA”,

Nama : TIGOR ALBERT JOSUA SINURAT  
Npm : 198520047  
Prodi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 12 April sampai dengan 14 Mei di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, untuk menyusun skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH) DI DESA HARIANJA KECAMATAN PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk melengkapi administrasi dan di pergunakan seperlunya.

